

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh :

Reni Sabrina

Email : risa_sabrina@yahoo.co.id

Pembimbing : Zulkarnaini, S. Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

SABRINA RENI . NIM 1201134988. Implementation of Compulsory Education Program 12 Years in Indragiri Hulu . Supervisor: Zulkarnaini S.Sos .

Indonesian government step in achieving educational equity issues, namely the decree No. 70 of 2014 on compulsory education to 12 years and fund regional Bos, 2015. One of the problems facing the district Indragiri Hulu in the field of education that is not maximal implementation of compulsory education to 12 years. Therefore the Government of Indragiri Hulu district is required to pay attention to school-age children to attend compulsory education to 12 years. The main problems that often arise in the success of compulsory education to 12 years is how the government can ensure that children who have graduated from elementary school continuing education to junior high school and children who have graduated from high school to continue their education to the high school level, facilitating school to children ages schools get a decent education, providing infrastructures as supporting teaching and learning activities in schools. This study aims to identify and analyze the implementation of compulsory education to 12 years and examine the factors that affect the implementation of compulsory education to 12 years in Indragiri Hulu.

The concept of the theory that researchers use on is public policy, program and policy implementation according to Edward who said that there are four variables that need to be considered in the implementation of the program, namely: 1. Communication, 2. Resources, 3. Disposition, 4. Bureaucratic Structure.

The results showed that the implementation of the program's 12-year compulsory education has not run optimally. It diketahun of resources is not adequate: there is a lack of human resources, financial resources are still inadequate, namely the budget obtained by the Department of Education to implement the program is not sufficient in number, socio-economic condition of society that can not afford that still many parents who economically disadvantaged. This resulted in 12-year compulsory education program is not running optimally in Indragiri Hulu.

Keyword: *implementation, program, compulsory 12 years*

PENDAHULUAN

Di dalam UU No.20 tahun 2003, Masyarakat berhak ikut dalam pelaksanaan program pendidikan. Akses pendidikan merupakan salah satu lini terpenting dalam meningkatkan pembangunan di semua aspek kehidupan, khususnya terhadap pengembangan kecerdasan dan keterampilan masyarakat.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau terus dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dengan melaksanakan program wajib belajar (wajib). Program ini dimulai dengan wajib belajar 6 tahun dan dilanjutkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan pada tahun 2013, dicanangkan kembali gerakan wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang pelaksanaannya di Riau akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Selanjutnya, oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun membentuk payung hukum guna memperkuat dukungan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan yakni dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun dan Dana Bos Daerah 2015.

Karena program wajib belajar 12 tahun ini bukan hanya soal persoalan bagaimana siswa bisa belajar sampai dari SD hingga SMA. Namun jaminan untuk tidak dipungut biaya selama 12 tahun juga penting untuk diperhatikan untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun sehingga anak-anak bangsa benar-benar belajar dalam suasana yang

aman tanpa ada beban pungutan selama 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti bertujuan untuk meneliti tentang wajib belajar 12 tahun yang berjudul : Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu”**.

Konsep Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut **Thoha (2010:102)**, kebijakan publik lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut **Edward III (1980:223)**, ia mengembangkan model didahului dengan dua permasalahan, yang menjadi pertanyaannya yaitu: 1) kondisi-kondisi awal apakah yang diperlukan untuk mensukseskan/keberhasilan implementasi kebijakan, 2) hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk menjawab dua pertanyaan itu, **Edward III dalam Sujianto (2008:38):**

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan

atau pengalamannya kepada orang lain.

2. Sumberdaya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

3. Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

3. Program

Menurut **Karding (2008:33)** menyatakan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang dilakukan.

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini

berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan interaksi terhadap kondisi yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki tanggung jawab terhadap terwujudnya program wajib belajar 12 tahun.

3. Informan Penelitian

Penelitian menetapkan, Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sekolah, serta siswa dan orang tua siswa dalam memperoleh data.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung didapatkan di lokasi penelitian maupun dengan cara wawancara dengan *key informan* untuk mendapatkan jawaban tentang kondisi yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi materi penelitian ini, gambaran umum dinas pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, kegiatan pegawai dinas pendidikan, struktur organisasi, jumlah pegawai

dan tata kerja pegawai di dinas pendidikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan tempat penelitian secara intensif untuk mengamati gejala-gejala yang timbul dilapangan.

b. Wawancara

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya kepada responden untuk memperoleh suatu keterangan data yang berhubungan dengan judul yang dibuat oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis, maupun elektronik yang terkait dengan struktur organisasi, daftar staf pegawai dinas dan bagaimana kelangsungan program wajib belajar 12 tahun.

6. Analisa Data

Merujuk dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam menganalisa data-data yang akan berhasil dikumpulkan tidaklah melakukan pengukuran tetapi lebih kepada menginterpretasikan, menggambarkan, melukiskan keadaan objek atau subjek (seseorang dalam lembaga, masyarakat) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun bukanlah hal yang mudah. Menurut Edward III ada 4 indikator yang diperlukan, yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melakukan komunikasi mengenai penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu oleh pihak Dinas Pendidikan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada sekolah dan juga masyarakat telah berjalan dengan lancar dan sudah berjalan dengan maksimal.

2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber daya manusia dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah guru dan jumlah guru tersebut sudah mencukupi, akan tetapi dari segi kualitas dan pendidikannya belum sepenuhnya memadai.

Selain itu dana yang di alokasikan untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun ini masih kurang mengingat masih banyaknya perekonomian masyarakat yang belum mampu sehingga banyak anak usia sekolah yang memerlukan biaya pendidikan gratis.

Selain sumber daya manusia dan ketersediaan dana juga diperlukan adanya fasilitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini tetapi sarana dan fasilitas yang ada belum memadai untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun.

3. Disposisi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu merespon kebijakan ini dengan baik. Dapat dikatakan pemerintah sangat mendukung dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini. Selain dari Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program juga mendapat respon positif dari guru dan orang tua siswa.

4. Struktur birokrasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa struktur birokrasi yang ada dan yang bersangkutan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengimplementasi program wajib belajar 12 tahun sudah cukup mendukung dan mengarah kepada efisien dan koordinasi yang cukup baik.

A. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Keterbaasan Anggaran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu belum cukup untuk melaksanakan program wajib belajar.

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi orang tua yang

sangat lemah sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan kondisi sosial orang tua, status sosial dan pendidikan orang tua yang rendah akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting karena mencari nafkah adalah prioritas yang paling utama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksana (implementor) tetapi juga pemerintah serta masyarakat didalamnya. Seorang pelaksana harus memiliki komitmen dengan memiliki komunikasi yang baik serta memiliki vitalitas juga integritas yang tinggi terhadap melaksanakan tugasnya guna mencapai sebuah tujuan dari implementasi. Pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan bupati nomor 79 tahun 2014 namun pada kenyataannya masih terdapat anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri hulu.
2. faktor yang menjadi penghambat program wajib belajar 12 tahun adalah peraturan pemerintah yang hanya bersifat menghimbau dan belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap orang tua yang anaknya putus sekolah sehingga menimbulkan efek jera, kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan program.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu, penulis dapat memberikan saran sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan efektifitas dari Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun ini, sehingga tidak ada lagi kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini. Selain itu peningkatan profesionalitas tenaga pendidik juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia.

2. Dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun hendaknya pemerintah dan pihak sekolah menerima dan menempatkan guru sesuai pendidikannya dan kualifikasi latar belakang pendidikannya. Selain itu pemerintah hendaknya juga menyediakan dana yang cukup serta fasilitas pendukung proses kegiatan belajar mengajar sehingga program wajib belajar 12 tahun ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Karding, Abdul Kadir. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*. Tesis. PPs-UNDIP.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf: Riau.

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Komtemporer*. Kencana: Jakarta.

Dokumen:

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.